



AE

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN**  
**PEMBANGUNAN III PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG**

Jl. Simpang Ijen No. 02 Telp. (0341) 551321-551323-551325-555366-556890 Fax 551323 Email :bakorwil3@jatimprov.go.id

**MALANG 65112**

Malang, 31 Juli 2019

Nomor : 556 / 4767 / 213.4 / 2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Rapat Sinkronisasi,  
Monitoring dan Evaluasi  
Peningkatan Pembangunan  
Pariwisata Se Wilayah Kerja  
BAKORWIL Malang Tahun 2019

Kepada  
Yth. Sdr. Bupati / Walikota  
Se Wilayah Kerja BAKORWIL  
Pemerintahan dan Pembangunan III  
Provinsi Jawa Timur di Malang

Bersama ini dilaporkan dengan hormat bahwa BAKORWIL III Provinsi Jawa Timur di Malang telah melaksanakan Rapat Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pembangunan Pariwisata Se Wilayah Kerja BAKORWIL Malang Tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut :

1. Tujuan kegiatan adalah mengidentifikasi permasalahan pariwisata di Kabupaten / Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL III Malang serta mencari solusi terbaik untuk penanganannya guna meningkatkan investasi dan pertumbuhan pariwisata di wilayah kerja BAKORWIL III Malang
2. Sebagai Penyaji dalam Rapat Sinkronisasi ini yaitu :
  - a. Sdr. Drs. Benny Sampirwanto, M.Si. dari BAKORWIL III Malang (Kepala Badan) dengan materi "Peranan BAKORWIL Untuk Meningkatkan Investasi Pariwisata" sekaligus sebagai moderator;
  - b. Sdr. Dra. Marfu'ah Suharti, M.Psi, Kepala Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan materi "Strategi Kepariwisata Jawa Timur dalam Rangka Mengoptimalkan Peran dalam Pembangunan di Jawa Timur"
  - c. Sdr. H. Arifudinsyah, SH. CN, Ketua ASITA Jatim dengan materi "ASITA dan Pengembangan Sektor Pariwisata di Jawa Timur"
3. Dalam Rapat Sinkronisasi ini diperoleh informasi sebagai berikut :
  - a. Masih terdapat belum adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dengan pelaku industri pariwisata sebagai misal terdapat daerah yang tidak / kurang aktif dalam mempromosikan daerah pariwisatanya karena kurang infrastruktur jalan yang belum memadai;
  - b. Adanya keluhan wisatawan asing terhadap harga tiket wisata karena terdapat perbedaan harga tiket antar wisatawan lokal dengan mancanegara, misalnya di wilayah Bromo Tengger Semeru;

- c. Masih belum adanya konsep destinasi wisata yang terintegrasi antar Kabupaten / Kota misalnya Daerah Tujuan Wisata Bromo Tengger Semeru (Harga Tiket Mauk, Harga Sewa Jeep, dll);
- d. Belum adanya standart baku untuk fasilitas pariwisata (misal sebagai wisata halal untuk hotel) dan masih terdapat belum siapnya daerah tujuan wisata dengan prasarana yang memadai (seperti banyak parkir liar, perhutani yang terlalu protektif terhadap lahan wisatanya, jalan, rest area pariwisata)
- e. Belum adanya pembagian tupoksi yang jelas antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Belum adanya diferensiasi potensi pariwisata masing – masing daerah (sebagai contoh apabila terdapat sebuah daerah sukses akan satu obyek wisata seperti boom water maka daerah - daerah lain akan membuat destinasi wisata dengan konsep yang sama;
- g. Kebijakan pemerintah daerah belum maksimal untuk kepariwisataan, (misal belum Kebijakan adanya free parkir pesawat dari luar negeri yang membawa wisman)
- h. Data kunjungan wisatawan belum akurat untuk pengembangan pariwisata, diharapkan dengan E- tiketing bisa membantu
- i. Minimnya anggaran Kabupaten / Kota untuk untuk pariwisata (misal Pelatihan sadar wisata)
- j. Belum adanya aturan/Perda yang melindungi pelaku industri lokal sebagai contoh ada peraturan yang melindungi pramu wisata lokal untuk harus menjadi Local Guide saat wisatawan mancanegara melancong ke Jawa Timur

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat dimaksud, maka disepakati peserta rapat untuk diusulkan hal-hal sebagai berikut :

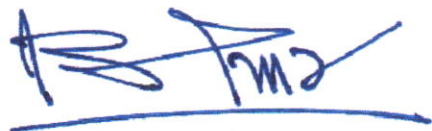
1. Perlunya meningkatkan sinergitas bersama antara pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dengan pelaku industri pariwisata terkait regulasi, yaitu mengikutsertakan pelaku usaha dalam proses pembuatan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan pariwisata;
2. BAKORWIL agar menjadi fasilitator antara pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dan pelaku industri pariwisata dalam memetakan dan mengembangkan potensi pariwisata di wilker BAKORWIL Malang dan mengembangkan sesuai potensi yang ada;
3. Pentingnya komitmen pihak Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota agar memajukan pariwisata dengan memberikan anggaran yang memadai, melakukan standarisasi, monitoring evaluasi terhadap seluruh kegiatan

AE

- pariwisata yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pelaku industri pariwisata termasuk perlindungan terhadap pelaku pariwisata lokal;
4. Perlunya menghilangkan ego kedaerahan dalam pengelolaan destinasi wisata irisan (untuk pengelolaan Kawasan BTS yang melibatkan beberapa Kabupaten sehingga kawasan tersebut menjadi satu konsep pariwisata terpadu yang memudahkan wisatawan keluar masuk daerah tersebut) dengan koordinasi yang intens antar BAKORWIL dengan Kabupaten / Kota;
  5. Perlunya pemakaian IT untuk pengumpulan data pariwisata dengan melibatkan seluruh stake holder pariwisata;
  6. Penyelarasan program pariwisata dengan program peningkatan ekonomi kreatif, misalnya antara Kawasan BTS dengan KEK menjadi dalam satu program.

Demikian laporan kami dan mohon petunjuk Ibu lebih lanjut.

KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III  
PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG



Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650718 199003 1 005